

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten setempat. Desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan Nasional disegala bidang baik dibidang Pemerintahan, pembangunan fisik, kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.(Partini h 2016)

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.(Peraturan Pemerintah RI 2014d) Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana : (a) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerimaan manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat, (b) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat, (c) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain.

Untuk melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat tertentu, Pemerintah Desa memerlukan dana, dana desa tersebut diantaranya bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bagian hasil pajak daerah, dana perimbangan Kabupaten/Kota bantuan dan pemerintah daerah, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan pendapatan desa yang sah. Untuk mendanai semua wewenang desa sumber pendapatan desa digunakan untuk memenuhi kewenangan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, kepedulian terhadap masyarakat serta pembangunan. (Riswan 2018)

Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya dapat membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. (Sumarni 2020)

Pengaturan tentang desa saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa. Undang-Undang ini mengatur mengenai menteris Asas Pengaturan, kedudukan dan jenis data, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan

pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan, Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Kehadiran UU Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan momentum percepatan pembangunan desa diseluruh wilayah Indonesia. UU Desa yang bersifat wajib menitik beratkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, pengelolaan aset dan keuangan desa, pembangunan kawasan desa, kewenangan desa dan perangkat desa.

UU ini dalam juga memungkinkan di bentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mengoptimalkan potensi dan aktivitas ekonomi pedesaan. Disahkannya Undang-Undang Desa membuat masyarakat desa mendapat angin segar. Hal ini karena desa akan mendapat bantuan dana yang disebut dengan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pambangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan penggunaan anggaran Desa dari Pemerintah pusat yang selalu ada atau selalu disalurkan disetiap tahunnya menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai apakah anggaran desa berdasarkan peraturan pemerintahan desa yang berlaku tersebut telah tersalurkan dan mampu menjadi persoalan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan? Ataukan

besarnya anggaran dana desa yang didapatkan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan para pemegang kekuasaan di Desa?

Program anggaran desa merupakan sebuah program, jika dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, pertanian maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya. Dan dengan adanya program anggaran desa sehingga dapat mewujudkan tercapainya tingkat kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Program ini ditangani langsung oleh aparat pemerintah desa. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola dengan baik dan jujur, transparansi maka hasil pemberdayaan akan terlihat nyata. (Suardi 2021)

Tujuan dari adanya anggaran desa adalah untuk pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat ditingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian tentang anggaran desa sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti terdahulu menunjukkan adanya konsistensi dan inkonsistensi hasil penelitian. Berikut pemaparan hasil penelitian terdahulu oleh penulis sebelumnya.

Menurut Suardi (2021) dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Parangloe Kecamatan Eremerasa Kabupaten Banataeng berpengaruh positif. Kemudian penelitian yang sejenis dengan penelitian selanjutnya yaitu menurut Ana Maria (2020) dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan terdapat

pengaruh yang positif dan signifikan variabel implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (X) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Y) Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat.

Meninjau dari fakta yang telah dijelaskan dalam penelitian-penelitian sebelumnya peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian terhadap variabel independen : Anggaran Desa dan Program Kerja Desa yang telah dijabarkan diatas terhadap variabel dependen : Kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Peraturan Kementrian Desa dan Transmigrasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan”.

1.2.Rumusan Masalah`

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di rumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah penggunaan anggaran desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan?
- b. Apakah program kerja desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan?
- c. Apakah anggaran desa dan program kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap usaha atau aktivitas seorang tidak lepas dari sasaran yang akan di raih.

Begitu juga dengan peneletian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Anggaran Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Program kerja Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Anggaran Desa dan Program Kerja Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Peneliti

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan menambah wawasan ilmiah tersendiri bagi peneliti.
- b. Guna memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo.

1.4.2. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Peraturan Kementrian Desa dan Transmigrasi.

1.4.3. Bagi Kantor Desa

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan saran, pemikiran serta informasi agar nantinya dapat bermanfaat untuk mengambil suatu keputusan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

1.4.4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi motivasi masyarakat untuk mengetahui dan mengerti mengenai Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Peraturan Kementrian Desa dan Transmigrasi.

1.5. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Batasan Masalah pada penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memberikan batasan terhadap objek penelitian yang akan diangkat sehingga penulis tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dari lokasi penelitian dalam menentukan batasan penelitian maka penulis mengarahkan pada informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

Batasan penelitian ini dimaksud untuk membatasi penulis untuk memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan. Batasan penelitian ini penulis menyesuaikan dengan judul Analisis Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Peraturan Kementrian Desa dan Transmigrasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen bukanlah suatu tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin dicapai itu adalah pelayanan atau laba. Walaupun manajemen hanya merupakan alat dan wadah saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindar dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat. (Manulang 1990)

Hasibuan (2009:2) mengatakan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan-kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” (pengelolaan), sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola. (Hasibuan 2009) , manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia melalui tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Menurut Hasibuan (2009), fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Menurut Hasibuan (2009), perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing* dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis, perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang penuh ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar resiko yang ditanggung relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah “memilih”, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada.

Berikut ini adalah tujuan perencanaan menurut Hasibuan (2009:95), yaitu :

- a) Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan.
- b) Perencanaan bertujuan untuk menjadikan tindakan ekonomis, karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan.
- c) Perencanaan adalah suatu usaha untuk memperkecil resiko yang dihadapi pada masa yang akan datang.
- d) Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan.
- e) Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan.
- f) Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukur hasil kerja
- g) Perencanaan menjadi suatu landasan untuk pengendalian.
- h) Perencanaan merupakan usaha untuk menghindari *mismanagement* dalam penempatan karyawan.
- i) Perencanaan membantu peningkatan daya guna dari hasil guna organisasi.

2. Pengorganisasian

Menurut Hasibuan (2009:118), fungsi pengorganisasian (*organizing*/pembagian) kerja berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian harus direncanakan. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-

departemen (subsistem) suatu penentu hubungan-hubungan. *Organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3. Pengarahan

Menurut Hasibuan (2009:183) fungsi pengarahan (*actuating*) adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat dijalankan setelah rencana, organisasi dan karyawannya ada. Pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja selektif dalam mencapai tujuan perusahaan.

Hasibuan (2009:183) mengatakan pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerjasama dan bekerja ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. Pengendalian

Menurut Hasibuan (2009:241), fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen. Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling

mengisi karena pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan, pengendalian baru dapat dilakukan jika rencana dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Dengan demikian peranan pengendalian sangat menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan suatu rencana. Hasibuan (2009:241) mengatakan pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Hasibuan (2009:242) mengatakan bahwa pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang baru dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut Haibuan (2009:242) tujuan penegendalian adalah sebagai berikut :

- a) Agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b) Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan agar tujuan yang dihasilkan sesuai rencana.

2.1.2. Konsep Anggaran Desa

Anggaran adalah estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial, (Nordiawan 2015). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa, yang dibahas dan disepakati

antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa.

Pemerintahan desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. (Utami 2018)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

1. Pendapatan Desa Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Transfer
 - c. Pendapatan lain-lain
2. Belanja Desa Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah desa
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa

- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa
 - e. Belanja tak terduga
3. Pembiayaan Desa Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Pembiayaan terdiri dari:
- a. Penerimaan pembiayaan
 - b. Pengeluaran pembiayaan

Menurut Tahir,(2018) indikator-indikator Anggaran Desa terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Transparansi merupakan terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan tanggungjawab Anggaran Desa, meliputi:
 - a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur. pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
 - b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
 - c. Keterbukaan proses pengelolaan.
 - d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD.
2. Akuntabel adalah pertanggung jawaban tim pelaksana pengelolaan Anggran Desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawaban utama, meliputi:
 - a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan alokasi dana desa

- b. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
 - c. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa
 - c. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa
3. Partisipasif merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadiran program pembangunan serta proyek akan gagal.
- a. Tercapainya tujuan dama pengelolaan ADD
 - b. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
 - c. Adanya lapopran pertanggungjawaban pengelolaan ADD
 - d. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD

2.1.3. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Secara bahasa dana desa terdapat dua kata yaitu dana dan desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata swadesi (Bahasa Sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasar asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Khasanah and Marisan 2022)

Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 294 ayat 3 tentang dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta

pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa. (Peraturan Pemerintah RI 2014c)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015, Pasal 4 tentang prioritas dana desa menjelaskan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. (Peraturan Pemerintah RI 2015) Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bertujuan untuk :

- a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa.
- b. Sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa.
- c. Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan diluar dana transfer daerah yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap. Dana desa berbeda dengan alokasi dana desa, dana desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepala desa. Prioritas penggunaan dana desa diatur melalui

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dana pertimbangan. (Oktara 2019)

b. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan dan menyalurkan dana desa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dalam hal ini daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan dana desa kepada desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan dana pertimbangan tahun berikutnya. (Novianto 2019)

Pemerintah menetapkan dana desa didalam jenis belanja transfer ke daerah dan desa, pada kelompok belanja Negara dalam UU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau UU tentang perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan dana desa untuk setiap Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang penjabaran APBN. (Hariyani 2018)

Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundang-undangan, dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 pasal 93 tentang desa,(Peraturan Pemerintah RI 2014b) yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Peraturan Pemerintah RI 2014a) di jelaskan bahwa :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh sekretaris Desa dan disampaikan kepada kepala desa yang kemudian dibahas bersama dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana anggaran biaya yang mengharuskan mengajukan surat permintaan pembayaran.
3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.
4. Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan kepada Kepala Desa Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan melampirkan format laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, format laporan kekayaan milik desa dan format laporan pemerintahan dan pemerintahan daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

Pemerintah kemudian menyalurkan dana desa secara bertahap setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Peraturan tentang APBD Kabupaten/Kota
2. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan pemerintah UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dana desa disalurkan (ditransfer) ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas desa. Dana desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya dana desa disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepala desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas daerah.

c. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peremendesa PD TT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan,(Peraturan Pemerintah RI 2021) yaitu :

1. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa, dan
2. Menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk didalamnya dana desa.

Sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan prioritas Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Desa
 - a) Prioritas penggunaan dana desa dilakukan berdasarkan peraturan desa mengatur mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
 - b) Apabila kewenangan desa tidak memiliki peraturan desa mengatur mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka dasar penentuan prioritas penggunaan dana desa adalah peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
 - c) Apabila tidak memiliki peraturan Bupati/Walikota kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka desa tetap dapat menentukan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri ini.

2. Swakelola

- a) Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemeberdayaan Masyarakat Desa.
- b) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
- c) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat desa misalnya : studi banding, pelatihan pra-tugas kepala desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan desa yang didanai dana desa dilaksanakan secara swakelola ketiga.

3. Padat Karya Tunai Desa

- a) Penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
- b) Pekerjaan diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
- c) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya perkegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD.
- d) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari

- e) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi : menggunakan masker, menerapkan jarak aman antar satu pekerja dengan pekerjaan lain minimum 2 (dua) meter, dan warga desa yang sakit dilarang ikut bekerja.
- f) Jenis-jenis Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yaitu, pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan, pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pagar dan perkebunan, pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain, dan penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan. (Rahmah, Pratiwi, and Rismayanti 2021)

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.(Yulawati 2019)

2.1.4. Program Kerja Desa

Program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan diawal bagian mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Aktivitas yang menggambarkan diawal ini biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaiannya, penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, pembagian wewenang dan tanggung jawab serta kejelasan lainnya yang dianggap perlu. Program kerja Desa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan atau yang lebih dikenal sebagai PPIP bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desanya. (Aditiya 2020)

Lokasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tersebar di 32 (tiga puluh dua) provinsi, dengan sasaran lokasi mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum. Dalam pelaksanaannya, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) terus berupaya meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan program. (NADIA 2021)

Hal-hal tersebut dilakukan melalui :

- a. Peningkatan kepedulian dan kesadaran mengenai pentingnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur dasar disemua tingkatan pelaku;

- b. Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program khususnya peran serta perempuan dan masyarakat kelompok miskin, terutama dalam pengambilan keputusan;
- c. Peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan yang terintegritas dalam sistem penyelenggaraan program;
- d. Peningkatan kualitas kerja, melalui pemantauan kinerja yang akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai di tingkat desa;
- e. Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem penghargaan dan sanksi bagi penyelenggara program, dari tingkat provinsi, kabupaten, dan tingkat desa, dll;
- f. Penguatan mekanisme serta pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara optimal dalam semua tahapan, kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program, penentuan jenis kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan, serta rencana pengelolaannya. Disamping itu dengan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya maka diharapkan terjadi percepatan proses kemandirian masyarakat dan terwujudnya sinergi berbagai pelaku pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) hadir dengan maksud dan tujuan :

- a. Maksud : Sebagai upaya mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- b. Tujuan : Untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat, miskin dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas kepelayanan infrastruktur dasar permukiman pedesaan, yang mendukung pengembangan potensi desa dengan berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Komponen program dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) diantaranya :

1. Penguatan kapasitas perencanaan masyarakat

Program ini mendukung dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merencanakan, melaksanakan, mengelola dan memantau pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar permukiman. Penguatan dilaksanakan melalui: memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan; mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya serta kearifan sosial, budaya dan geografis.

2. Peningkatan layanan dan penyediaan infrastruktur desa melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Dana Bantuan disalurkan langsung ke desa sasaran untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan RKM (Rencana Kerja

Masyarakat) yang telah ditetapkan masyarakat. Komponen Bantuan Langsung Tunai dana stimulan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk menumbuhkan keswadayaan dalam membiayai sebagian rencana kegiatan yang disusun oleh masyarakat. Masyarakat dapat menyepakati apakah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dipergunaan untuk membiayai satu jenis kegiatan atau lebih sesuai dengan penilaian prioritas dan keputusan musyawarah desa.

3. Peningkatan kapasitas pelaksanaan dan pengendalian program

Peningkatan dan penguatan kapasitas pelaksanaan program dilakukan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, dengan kegiatan antara lain :

- a. Pendampingan dan fasilitasi oleh konsultan manajemen untuk mendukung Tim Pelaksana Pusat, Tim Pelaksana Provinsi dan Tim Pelaksana Kabupaten serta satuan kerja disetiap tingkatan. Pendampingan konsultan akan mencakup bantuan teknis; manajemen dan dukungan pengembangan kapasitas dalam perencanaan program; pengelolaan dan koordinasi; pelaksanaan penanganan pengaduan; disain teknis dan kualitas konstruksi; manajemen keuangan dan akuntansi; serta pelatihan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia. Pendampingan mencakup juga peningkatan kapasitas untuk pemantauan dan evaluasi.
- b. Peningkatan pelaksanaan pengendalian dengan menguatkan tugas dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi program.
- c. Dalam rangka peningkatan pelaksanaan kegiatan, program memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) untuk memberikan kontribusi positif melalui pemantauan dan evaluasi yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan. (Ana Maria 2020)

Indikator Program Kerja Desa menurut Ahmad S. Ruki (2001) mengandung tiga komponen yaitu :

1. Sarana dan prasarana yaitu segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.
2. Program kerja atau metode kerja yaitu kegiatan dari sistem kontrol terhadap hasil kerja pelaksanaan sehingga apa yang dikerjakan dilapangan sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat teknis yang disepakati.
3. Kemampuan sumber daya alam yaitu kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.1.5. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan social, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan social bagi diri, keluarga dan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang menjadi tolok ukur

kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. (Harahap 2021)

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi : pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Indikator Kesejahteraan Masyarakat menurut Soetomo (2014) mengandung tiga komponen yaitu:

1. Keadilan sosial meliputi : pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, serta penduduk miskin.
2. Keadilan ekonomi meliputi : pendapatan, kepemilikan rumah, dan tingkat pengeluaran.
3. Keadilan demokrasi meliputi : rasa aman dan akses informasi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam pembahasan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pertini. H (2018), Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	Dana Desa (X1), Pembangunan fisik Desa (X2), dan Efektifitas pengelolaan dana desa (Y)	Pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Balangtanaya dapat diketahui bahwa semua kegiatan pembangunan fisik pada tahun 2017 mencapai angka 100% yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya sudah berjalan dengan baik dan berada dalam kategori efektif.
2	Riswan (2018), Pengaruh Penyaluran Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batulaja Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto	Penyaluran Dana Desa (X), Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Penyaluran dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto mampu meningkatkan pendapatan pertanian masyarakat Desa Batujala. Penyaluran dana Desa yang di salurkan oleh pemerintah Desa Batujala mampu meciptakan pembangunan jalan tani, drainase dan pemberian sarana

			pertanian sehingga mampu mensejahterahkan masyarakat Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
3	Desi Hariyani (2018), Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi kasus di Desa Sungai Rambut Ke. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur)	Alokasi Dana Desa (X), Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Menunjukkan uji T yang dilakukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa karena $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $8,883 > 1,66342$ dan signifikan yang dihasilkan $0,00 < 0,05$. Hal ini berarti variabel alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
4	Novemia Nanda Yuliawati (2019), Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Bantuan Keuangan APBD terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (studi pada anggaran desa-desa yang ada di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)	Alokasi Dana Desa (X1), Dana Desa (X2), Pendapatan Asli Desa (X3), Bantuan Keuangan (Y)	Menunjukkan bahwa: 1) Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa 2) Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang Pembangunan Desa 3) Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa. 4) Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa

5	Suardi (2021), Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Parangloe Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng	Alokasi Dana Desa (X), dan Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Parangloe Kecamatan Eremerasa Kabupaten Banataeng berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan skor rata-rata diperoleh dari item pernyataan sebesar 165,3 atau 82,65% yang menandakan bahwa alokasi dana desa menempati posisi yang sangat baik. Kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Parangloe Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng dengan presentase sebesar 84,1% dan selebihnya yaitu sebesar 15,9% disebabkan faktor-faktor lain.
6	Nisya Agniya Rahmah, Laras Pratiwi, Gista Rismayani (2021), Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidangkasih di Era Pandemi Covid-19	Pengelolaan Dana Desa (X1), Prioritas Penggunaan Dana Desa (X2), dan Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidangkasih di era pandemi Covid-19. Penelitian ini bersifat penting karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kebaruan dalam

			penelitian ini berfokus pada pengaruh prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Desa Sindangkasih.
7	Mutia Sumarni (2020), Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pengelolaan Dana Desa (X), dan Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif. Sedangkan nilai adjusted R2 adalah 0,46 yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model persamaan adalah 46,0 % .
8	Afista Nurkhasanah h, Ichwan Marisan (2021), Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (studi pada Desa Jambu Kec. Mlonggo Kab. Jepara)	Penggunaan Alokasi Dana Desa (X1), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X3), dan Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Variabel penggunaan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,804, variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,000, variabel transparansi desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,225, penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif

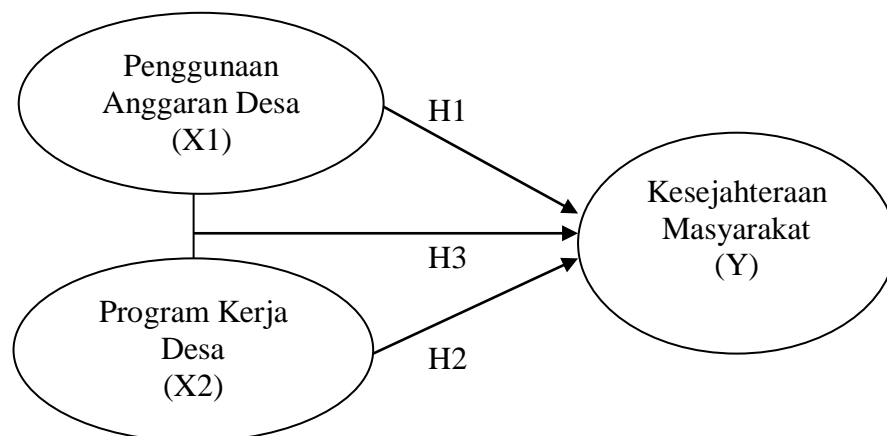
			signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan 0,000.
9	Ana Maria (2020), Pengaruh Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kenyayan Kecamatan Siluq Ngurai Kutai Barat Kalimantan Timur	Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (X), Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel implementasi program pemberdayaan masyarakat (X) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Y) Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat. Pengaruh yang dihasilkan adalah pengaruh positif dan signifikan, dapat dilihat dari data hasil uji T (Parsila), menunjukkan nilai t-hitung $6,310 > 2,021$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Dari hasil Uji F juga menyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, karena nilai F-hitung $39,811 > 4,06$ nilai F-tabel dengan nilai signifikansi (sig) 0,000.
10	Ega Nadia (2021), Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat	Alokasi Dana Desa (X), Pembangunan Infrastruktur (Y)	Hasil perhitungan uji t hitung sebesar 3,946, sedangkan pada t tabel adalah 1,98472 pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa H_0 di terima dan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu juga di

			peroleh persamaan regresi $Y = 17.528 + 0,342X$. Jadi dapat di simpulkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan infrastruktur.
--	--	--	---

2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu alat untuk menggambarkan konsep maupun pola pikir terhadap permasalahan peneliti.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis sebagai langkah awal dari penelitian untuk membuktikan suatu kebenaran. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, landasan teori serta penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H0. Diduga Penggunaan Anggaran Desa tidak berpengaruh terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

H1. Diduga Penggunaan Anggaran Desa berpengaruh terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

H0. Diduga Program Kerja Desa tidak berpengaruh terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

H2. Diduga Program Kerja Desa berpengaruh terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

H0. Diduga Penggunaan Anggaran Desa dan Program Kerja Desa tidak berpengaruh terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

H3. Diduga Penggunaan Anggaran Desa dan Program Kerja Desa berpengaruh terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menganalisa data secara mendalam. Nantinya penelitian ini akan mendeskripsikan data-data terkait permasalahan yang diteliti dalam penelitian. Penelitian ini bersifat verifikasi dengan menggunakan data primer untuk menjawab pokok permasalahan dan menjabarkan tujuan penelitian yang nantinya diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada responden untuk memperoleh data utama data utama penelitian dan melengkapi penjelasan-penjelasan akan penelitian. (Priono 2016)

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan. Dan kemudian waktu penelitian ini pada bulan Maret-April 2022.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2004) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Keseluruhan subjek penelitian disebut juga sebagai populasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Desa Mulyorejo.

3.3.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu secara sengaja (Sugiyono,2008). Teknik ini juga disebut sebagai *judgemen sampling* karena proses pengambilan sampel telah dipertimbangkan dengan menentukan terlebih dahulu ciri-ciri khusus berdasarkan tujuan tertentu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti (Silalahi,2010). Subjek penelitian diambil dengan melakukan pertimbangan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti.

Adapun kriteria yang telah ditentukan peneliti yaitu sebagai berikut :

- a. Masyarakat Desa Mulyorejo
- b. Berusia 17 Tahun keatas (terdiri dari remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak)

Dikarenakan dalam penelitian ini belum diketahui jumlah populasinya maka peneliti menggunakan Rumus *Lemeshow* untuk menentukan sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{Z\alpha^2 \times P \times Q}{L^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel minimal yang diperlukan

$Z\alpha$ = Nilai standar dari distribusi sesuai nilai $\alpha = 5\% = 1.96$

P = Prevalensi *outcome*, karena data belum didapat, maka dipakai 50

$$Q = 1 - P$$

L = Tingkat ketelitian 10%

$$\text{Berdasarkan rumus, maka } n = \frac{(1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5}{(0.1)^2} = 96.04$$

Dengan dasar tersebut maka dapat dilihat ukuran sampel minimal yang harus dicapai dalam penelitian ini adalah sebesar $n = 96,04$ dibulatkan menjadi 100.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

3.4.1 Jenis data

Data berdasarkan bentuk dan sifatnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang menggunakan perhitungan atau metode statistik untuk mengolah data yang diperoleh.

3.4.2 Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, meliputi karakteristik responden dan persepsi responden terhadap variabel penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan organisasi yang bukan pengelola.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung, pengumpulan ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang dianggap memenuhi kriteria penelitian. Penelitian dapat

menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang terkait dengan pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian dan perilaku dari responden (Sugiyono, 2018)

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *guide interview* (Nazir,1988).

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. (Sugiono,2009:87)

3.5.4 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari literatur yang berhubungan langsung dengan variabel penelitian.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Definisi operasional variabel adalah batasan atau spesifikasi dari variabel-variabel penelitian yang secara konkret berhubungan dengan realitas yang akan diukur dan merupakan manifestasi dari hal-hal yang akan diamati sehingga terbuka untuk diuji kembali oleh peneliti lain. adapun definisi operasional variabel dan indikator variabel yang diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

NO	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator Variabel	Skala
1	Anggaran Desa (X1)	Anggaran desa adalah estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.	a. Transparan b. Akuntabel c. Partisipatif Menurut Tahir,(2018)	Ordinal
2	Program Kerja (X2)	Program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan diawal bagian mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Aktivitas yang menggambarkan diawal ini biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaiannya, penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, pembagian wewenang dan tanggung jawab serta kejelasan lainnya yang dianggap perlu.	a. Sarana dan prasaraa b. Proses kerja atau metode kerja c. Kemampuan sumber daya manusia Menurut Ahmad S. Ruki (2001)	Ordinal
3	Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan manusia.	a. Keadilan sosial b. Keadilan ekonomi c. Keadilan demokrasi Menurut soetomo (2014)	Ordinal

3.7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan peneliti adalah skala likert. Menurut (Sugiyono, 2016) Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert juga digunakan untuk melengkapi angket yang yang bervariasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju.

1. Sangat setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Cukup (C)
4. Tidak setuju (TS)
5. Sangat tidak setuju (STS)

3.8. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk mengolah data adalah tehnik statistik melalui program exel statistic analisis dan SPSS. Adapun tehnik analisi data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Uji Data
 - a. Uji Validasi

Menurut (Sugiyono, 2014) Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Berdasarkan definisi diatas maka validasi dapat diartikan suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan penelittii untuk di ukur. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara yang dilaporkan

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien korelasi $r=0,5$. Jadi apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,5, maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan “tidak valid”.

b. Uji Realiabilitas

Uji realibilitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang (Sudjana, 2005). Dalam pengambilan keputusan reliabilitas, suatu instrumen dilakukan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* (α) lebih besar dari 0,6.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga data diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya etimasi bias. Pengujian asumsi klasik yaitu sebagai berikut :

a. Uji normalitis

Uji normalitas adalah dimana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal., Sunyoto (2016). Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai eror yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga

layak dilakukan pengujian secara statistik. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Test Normality Kolgorov-Smirnov*, Singgih Santoso (2012). Dasar pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan probabilitas (*Asymptotic Significanted*), yaitu :

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

b. Uji multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variabel bebas. Efek dari multikolinieritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linier antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinieritas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/tolerance$, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam persamaan regresi berganda perlu juga di uji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain, Sunyoto (2016). Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut terjadi Heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu, dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distudentized Ghozali (2011). Homoskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik-titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda melibatkan penentuan hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen apakah berpengaruh positif atau negatif dan memprediksi bahwa nilai variabel dependen akan meningkat atau menurun (Dianthi dan Wirakusuma, 2017).

Persamaan regresi linier berganda dalam pernyataan ini di rumuskan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kesejahteraan Masyarakat

a = Konstanta

X₁ = Anggaran Desa

X₂ = Program Kerja

e = Error term (tingkat kesalahan)

4. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu masalah dan merupakan penuntunan untuk melakukan penelitian. Apabila uji statistik berada dalam daerah krisis (daerah dimana H₀ ditolak), pengujian tersebut bermagna signifikan, sedangkan disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H₀ diterima.

a. Uji Statistik F

Uji statistik F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dan F-tabel. Jika F-hitung > F-tabel, maka H₀ ditolak artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan jika F-hitung < F-tabel maka H₀ diterima artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F\text{-hitung} = \frac{R^2/k - 1}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Dimana :

R² = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

b. Uji Statistik T

Menurut Ghozali (2011), uji-T merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Kriteria yang menentukan adalah jika nilai signifikan $> 0,025$ dan nilai t hitung $> t$ tabel maka koefisien regresi tidak signifikan atau variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat sebaliknya jika nilainya $< 0,025$ dan nilai t hitung $< t$ tabel koefisien regresi signifikan atau variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. (Siswiraningtyas dan Yuhertiana, 2021).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi dan variabel dependen atau variabel terikat. Koefisien determinasi juga menjelaskan besarnya masing-masing pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga dapat diketahui variabel bebas mana yang memiliki efek paling dominan terhadap variabel terikat (Ghozali 2011). Nilai koefisien determinasi memiliki interval antara 0 sampai 1. Jika nilai R semakin mendekati 1, menandakan hasil untuk model regresi tersebut baik atau variabel independen secara keseluruhan dapat menjelaskan variabel dependen. Sedangkan jika nilai R semakin mendekati 0, maka berarti variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.1.1. Kondisi Umum Desa

a. Sejarah Desa Mulyorejo

Sejarah Desa Mulyorejo diawali dengan program transmigrasi Pemerintah Republik Indonesia yang mendatangkan masyarakat dari pulau yang konsentrasi penduduknya padat seperti pulau Jawa, Bali dan Lombok. Sejak beririnya pada tahun 1973 sebagai unit daerah transmigrasi, Desa Mulyorejo dipimpin oleh seorang Kepala Unit Daerah Transmigrasi (KUDT) Mulyorejo yang bernama Sahat Sinaga BA. Selanjutnya pada tahun 1982 menjadi Desa Persiapan Mulyorejo yang dipimpin oleh pejabat kepala desa yaitu Umar Pando sampai dengan tahun 1984. Sejak resmi menjadi desa definitif hingga saat ini terdapat 7 (tujuh) orang kepala desa. Berikut nama-nama Kepala Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

Tabel 4.1

Daftar Nama Kepala Desa Mulyorejo

NO	NAMA	TAHUN
1	Umar Pando	1982-1992
2	R. Subagyo	1992-2006
3	Drs. Muslim Muchtar, Msi	2006-2007
4	Halimun	2007-2019
5	Anjas Rusli, S.Si,Mkes	2019-2020
6	Ari Setiawan, S.STP, MM	2020-2021
7	Rudi Hartono, S.P	2021- Berjalan

b. Kondisi Geografis Desa

Secara Cluster Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, Desa Mulyorejo termasuk dalam Cluster Perkotaan, letak Desa Mulyorejo sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam Pemerintahan Kecamatan Sukamaju Selatan. Letak Desa Mulyorejo yang berdekatan dengan Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara \pm 30 km dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara dengan luas 671,55 Ha yang terdiri dari pemukiman seluas 196,73 Ha, kebun sawit seluas 332,09, kebun coklat seluas 15,43 Ha, sawah seluas 126,27 Ha, kebun seluas 1,03 Ha. Desa Mulyorejo berbatasan dengan sebelah utara adalah Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju, sebelah selatan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan, sebelah timur Desa Sukaraya Kecamatan Bone-Bone dan sebelah barat Desa Banyuwangi Kecamatan Sukamaju Selatan. Secara administrasi Desa Mulyorejo terbagi menjadi 8 (delapan) Dusun yaitu, Dusun Rawasari, Dusun Purwasari, Dusun Purworejo, Dusun Muktisari, Dusun Rejosari, Dusun Rejomukti, Dusun Rejoagung dan Dusun Rowomulyo.

c. Kondisi Sosial Budaya

Secara umum kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya :

1. Kondisi Demografis/ kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisis Kependudukan Partisipatif) pada tahun 2021 jumlah penduduk Desa Mulyorejo, berjenis kelamin laki-laki = 2.361 jiwa, berjenis kelamin perempuan = 2.459 jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena

pendapatan/ *updating* akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Mulyorejo.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	2.361	48,9%
2	Perempuan	2.459	51,1%
	Total	4.820	100%

2. Kondisi kesehatan masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak-hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas Desa Mulyorejo. Untuk itu pada RPJM Desa tahun 2021-2027, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala prioritas desa akan tetap menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang Kecamatan. Dengan 3 (tiga) posyandu balita dan 1 (satu) posyandu lansia yang ada di Desa Mulyorejo untuk biasanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di Desa Mulyorejo.

3. Pendidikan, sektor pendidikan adalah hal penting yang menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan seorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi-informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas.
4. Kesejahteraan masyarakat, dengan berkembangnya jumlah penduduk di Desa Mulyorejo secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari pandemi *Covid-19* maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dan program-program yang sudah ada lebih ditingkatkan seperti, BSP, PKH, dll. Dalam hal ini, melalui Dana Desa Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.
5. Agama, dalam perpektif agama masyarakat di Desa Mulyorejo termasuk masyarakat yang homogen, hal ini karena dibuktikan bahwasanya masyarakat

Desa Mulyorejo mayoritas beragama islam. Tingkat kemayoritasan agama islam di Desa Mulyorejo sangat dipengaruhi oleh kultur yang sudah lama ada di Desa Mulyorejo, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4.621
2	Katholik	5
3	Kristen	173
4	Hindu	21
5	Budha	0
Jumlah		4.870

6. Budaya, budaya atau kultur yang ada dimasyarakat Desa Mulyorejo masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam. Hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dituntut oleh masyarakat desa Desa Mulyorejo adalah agama islam. Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat Desa Mulyorejo masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di Desa Mulyorejo banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu.
- d. Kondisi Sosial Ekonomi Desa

Desa Mulyorejo mempunyai potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisi ekonomi masyarakat. Desa Mulyorejo tidaklah sama, secara potensi ekonomi

Desa Mulyorejo terbagi menjadi 3 wilayah besar, tentunya karena terbagi menjadi 3 wilayah besar potensi ekonomi sangatlah berbeda, sebagian besar bergerak disektor pertanian, UMKM dll. Untuk wilayah Dusun barat, tengah maupun timur mayoritas bertumpu pada sektor pertanian meskipun ada juga yang bergerak disektor lain seperti industri rumah tangga, sektor pemerintahan dan bergerak disektor swasta, sektor perdagangan, pertokoan, sehingga dari ketiga wilayah ekonomi tersebut sangatlah diharapkan kesemuannya bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Mulyorejo dengan naiknya taraf pendapatan penduduk Desa Mulyorejo.

1.1.2. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa Mulyorejo

Secara administrasi Desa Mulyorejo terbagi menjadi 8 (delapan) Dusun yakni : Dusun Rawasari, Dusun Purwasari, Dusun Purworejo, Dusun Muktisari, Dusun Rejosari, Dusun Rejomukti, Dusun Rejoagung, dan Dusun Rowosari. Akan tetapi, wilayah Desa Mulyorejo dari semua pembagian wilayah pada Desa Mulyorejo terdiri dari 28 RT tersebar dari masing-masing Dusun.

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Mulyorejo terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi dan pelaksanaan kewilayahan serta Staff Desa.

Tabel 4.4

Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	Rudi Hartrono, S.P	Kepala Desa
2	Eko Wahyu Nugroho, S.Sos	Sekertaris Desa

3	Yesi Manindar, S.AN	Kasi Pemerintahan
4	Verani Puspa Dewi, S.E	Kai KESRA
5	Siti Patimah, S.Pdi	Kaur Umum
6	Dian Atika, S.M	Kaur Keuangan
7	Pitoyo	Kepala Dusun Rawasari
8	Inna Chasanah, S.Si	Kepala Dusun Purwasari
9	Sakri	Kepala Dusun Purworejo
10	Dasep Turachman	Kepala Dusun Muktisari
11	Tukijan	Kepala Dusun Rejosari
12	Sukirman	Kepala Dusun Rejomukti
13	Ngarino	Kepala Dusun Rejoagung
14	Duwi Hariyanto	Kepala Dusun Rowomulyo
15	ST. Ririn Lestari, S.E	Staf Desa

Tabel 4.5

Daftar Nama BPD Desa Mulyorejo

NO	NAMA	JABATAN
1	Musaroji	Ketua BPD
2	Wahyu Hidayat	Wakil Ketua
3	Nurma	Sekretaris
4	Pinaringsih	Anggota
5	M. Yusuf Abadi	Anggota
6	Maryanto	Anggota
7	Abdullah Pratama	Anggota
8	Sri Anggraeni	Anggota
9	Zainal Arifin	Anggota

1.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel yaitu individu-individu yang berada dalam wilayah desa mulyorejo yaitu masyarakat yang menurut peneliti layak untuk dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran lembar kuesioner penelitian secara langsung kepada responden. Berikut ini adalah gambaran umum deskripsi responden :

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.6
Jenis kelamin Responden

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	55	55%
2	Perempuan	45	45%
	Jumlah	100	100%

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.7
Usia Responden

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase
1	17 – 30 Tahun	53	53%
2	31 – 40 Tahun	18	18%
3	41 – 50 Tahun	18	18%
4	51 - >	11	11%

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.8
Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	21	21%
2	SMP	14	14%
3	SMA/SMK	47	47%
4	Diploma	6	6%
5	Sarjana	12	12%

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Tabel 4.9
Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Jumlah Responden	Persentase
1	Menikah	65	65%
2	Belum Menikah	35	35%

4.2.2 Uji Kualitas data

a. Uji Validitas

Menurut Sugiono 2017:125 hal ini menunjukkan tingkat keakuratan anatar data yang benar-benar mencapai subjek dengan data yang di kumpulkan oleh peneliti. Uji validitas ini dilakauakn untuk mengukur apakah data di peroleh setelah penelitian adalah data yang valid menggunakan alat ukur yang di gunakan yaitu kusioner (yulia,2019)

Uji validitas dalam penelitian menggunakan dua sisi dengan nilai signifikan 0.05 dengan jumlah responden 100 yaitu dengan nilai r tabel 0.1946. pernyataan dalam kusioner dikatakan valid jika r hitung > r tabel. Berikut adalah hasil uji validasi intrumen penelitian:

Tabel 4.10
Uji Validitas

VARIABEL	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,631	0,1946	Valid
X1.2	0,542	0,1946	Valid
X1.3	0,732	0,1946	Valid
X1.4	0,604	0,1946	Valid
X1.5	0,386	0,1946	Valid
X1.6	0,737	0,1946	Valid
X2.1	0,614	0,1946	Valid
X2.2	0,664	0,1946	Valid
X23	0,594	0,1946	Valid
X2.4	0,373	0,1946	Valid
X2.5	0,641	0,1946	Valid
X2.6	0,599	0,1946	Valid
Y.1	0,718	0,1946	Valid
Y.2	0,545	0,1946	Valid
Y.3	0,718	0,1946	Valid
Y.4	0,569	0,1946	Valid
Y.5	0,703	0,1946	Valid
Y.6	0,351	0,1946	Valid

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga kuesioner tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian, walaupun penelitian ini dilakukan berulang-ulang dengan kuesioner yang sama.

Uji validitas dalam penelitian menggunakan standar reabilitas 0,60 jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari Standar Cronbach Alpha maka pelenilitain ini dapat dikatakan reliabel. Berikut adalah hasil uji validasi intrumen penelitian berikut hasil uji reliabilitas:

Tabel 4.11
Uji Reabilitas

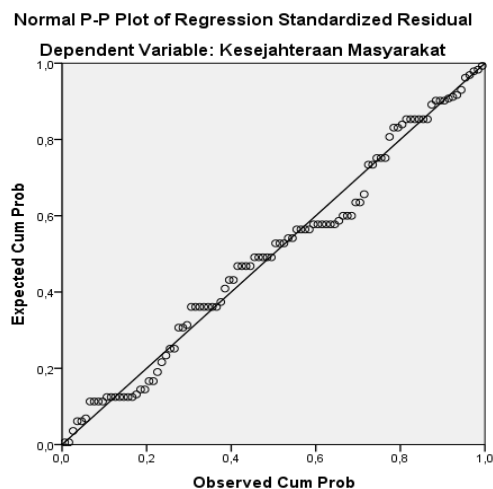
NO	Variabel	Cronbach Alpha	R Standar	Ket
1	Penggunaan Anggaran Desa	0,652	0,60	Reliabel
2	Program Kerja Desa	0,614	0,60	Reliabel
3	Kesejahteraan Masyarakat	0,655	0,60	Realibel

4.2.3 Uji Asumsu Klasik

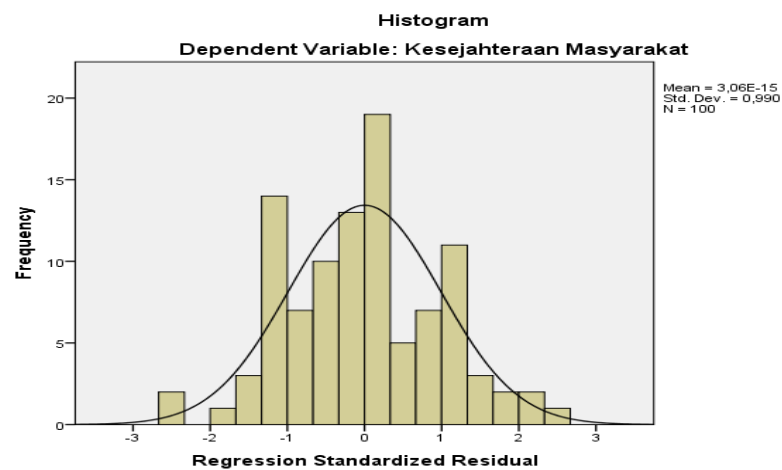
a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu yang memiliki nilai residual berdistribusi normal dan mendekati normal.

Gambar 4.1
Grafik P-plot Uji Normalitas



Gambar 4.2
Grafik Normal P-P Plot Of Regresion Standardized Residual



Berdasarkan grafik diatas, sebaran titik-titik pada grafik membentuk garis lurus diagonal yang berarti bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, baik pada grafik maupun nilai signifikansi pada taraf signifikansi 0,05.

Tabel 4.12
Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000	
	Std. Deviation	0,81009619	
Most Extreme Differences	Absolute	0,089	
	Positive	0,089	
	Negative	-0,060	
Test Statistic		0,089	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,049 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,384 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,372
		Upper Bound	0,397

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Berdasarkan tabel di atas hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai Sig dengan model Monte Carlo sig (2-tailed) yaitu $0,384 > 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas (tidak terjadi multikolinearitas)

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penggunaan Anggaran Desa	0,666	1,501
	Program Kerja	0,666	1,501

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

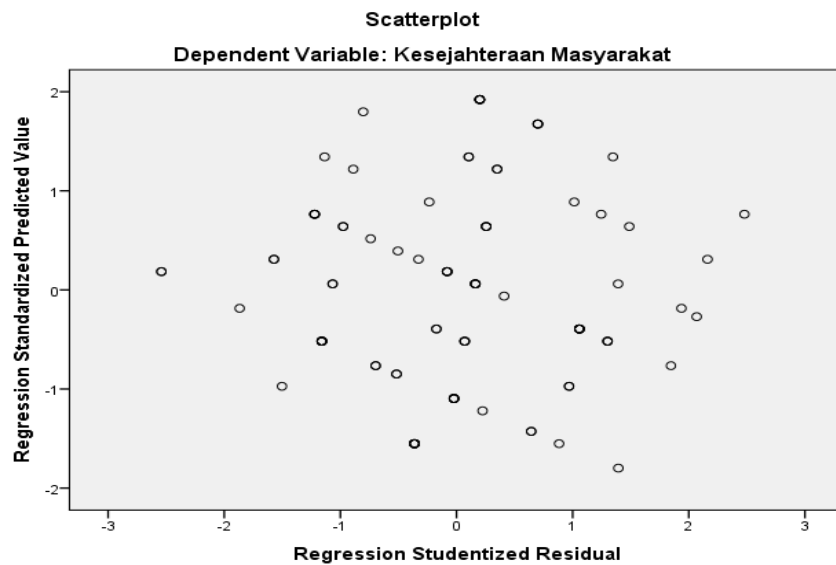
Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel penggunaan anggaran desa dan Program Kerja desa dengan nilai tolerance $0,666 > 0,10$ dan nilai VIF $1,501 < 10$ dan variabel. Hal ini menunjukkan dalam model regresi pada penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian heteroskedastisitas ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan

kepengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan kepengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas.

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Pada grafik di atas tampak titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, tidak terjadi pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

4.2.4 Uji Analisis Regresi Berganda

Analisi Regresi berganda dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Sugioyono, 2019). Berikut hasil analisis regresi linear berganda:

Tabel 4.14
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,603	2,133		5,910	,000
	Penggunaan Anggaran Desa (X1)	,103	,091	,116	1,134	,260
	Program Kerja (X2)	,439	,092	,491	4,790	,000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Berdasarkan analisis regresi berganda di peroleh persamaan regresi yaitu

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 12,603 + 0,103X_1 + 0,439X_2 + e$$

Y : Kesejahteraan Masyarakat

X₁ : Penggunaan Anggaran Desa

X₂ : Program Kerja Desa

e : error

Berdasarkan persamaan Regresi berganda diatas dapat diambil bahwa:

- Koefisien konstanta sebesar 12,603 menyatakan bahwa Penggunaan Anggaran Desa dan Program Kerja Bernilai 0, maka kesejahteraan masyarakat bernilai 12,603
- Koefisien regresi pada variabel penggunaan anggaran desa bernilai 0,103 menyatakan bahwa jika penggunaan anggaran desa tersebut di naikkan sebesar satu stuan maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat 0,103 satuan
- Koefisien regresi pada variabel program kerja sebar 0,439 menyatakan bahwa jika program kerja di naikkan sebesar satu stau maka kesejahteraan akan meningkat 0,439 satuan

4.2.5 Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji statistik t dilakukan untuk menguji secara parsial antara variabel penggunaan anggaran desa dan program kerja desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan kriteria variabel dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel, dengan nilai t tabel sebagai berikut :

$$t \text{ tabel} = t (a/2; n-k-1) = t (0,025; 97) = 1,98472$$

Tabel 4.15
UJI Statistik t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,603	2,133		5,910	,000
	Penggunaan Anggaran Desa (X1)	,103	,091	,116	1,134	,260
	Program Kerja (X2)	,439	,092	,491	4,790	,000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Di ketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,260 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,134 <$ dari tabel $1,98472$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 di tolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
2. Di ketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,790 >$ dari tabel $1,98472$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 di terima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y.

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan kriteria jika nilai signifikan $< 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai F_{tabel} sebagai berikut :

$$F_{tabel} (K;N-K) F (2;98) = 3,09$$

Tabel 4.16
Uji Statistik F (Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	137,649	2	68,824	22,889	,000 ^b
	Residual	291,661	97	3,007		
	Total	429,310	99			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

b. Predictors: (Constant), Program Kerja (X2), Penggunaan Anggaran Desa (X1)

Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 22,889 > F_{tabel} 3,09$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 Diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

c. Koefisien uji determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menguji signifikansi persentase variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R^2 mendekati 1 dapat dilihat bahwa model lebih kuat dalam menjelaskan variabel bebas ke variabel terikat namun jika nilai R^2 mendekati 0 maka model akan lemah dalam menjelaskan variabel independen ke variabel dependen.

Tabel 4.17
UJI Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,566 ^a	,321	,307	1,73402

a. Predictors: (Constant), Program Kerja (X2), Penggunaan Anggaran Desa (X1)

Berdasarkan tabel di atas diketahui Nilai R square sebesar 0,321 hal mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 32,1% sedangkan 67,9% dijelaskan oleh variabel lain.

1.3. Pembahasan

a. Penggunaan Anggaran desa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dari hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh tingkat signifikansi variabel penggunaan anggaran desa yaitu 0,260 yang berarti nilai tersebut ternyata lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Kemudian, penelitian ini juga dapat diketahui bahwa hasil variabel penggunaan anggaran desa memiliki nilai t hitung sebesar 1,134 dan t tabel 1,98472 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh penggunaan anggaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan alokasi dana desa harus dikelola dan dipergunakan dengan baik agar dana tersebut tepat sasaran sehingga dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Penggunaan alokasi dana desa di Desa Mulyorejo bisa dikatakan belum sesuai dengan tujuan alokasi dana desa sehingga pengaruh

Penggunaan anggaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak signifikan atau di tolak.

Hasil dari penelitian ini memiliki kesamaan berdasarkan dari yang telah diteliti oleh Afista Nur Khasanah dan Ichwan Marisan pada tahun 2021, bahwa penggunaan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t sebesar $t_{hitung} = 0,249 < t_{tabel} = 1,66071$ dengan nilai signifikan $0,804 > 0,05$. Maka hipotesis di tolak.

b. Program Kerja desa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dari hasil perhitungan uji hipotesis secara diperoleh tingkat signifikansi variabel Program Kerja Desa yaitu 0,000 yang berarti nilai tersebut ternyata lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Kemudian, penelitian ini juga dapat diketahui bahwa hasil variabel program kerja desa memiliki nilai t hitung sebesar 4,790 dan t tabel 1,98472 Sehingga perhitungan variabel Program kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan program kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dikarenakan nilai signifikansi program kerja berada di bawah nilai signifikan yang telah di tetapkan dan koefisien regresi memiliki arah hubungan yang positif, artinya apabila program kerja semakin tinggi maka semakin tinggi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mulyorejo, kemudian nilai t hitung lebih besar dari nilai t

tabel dan indikator yang terdapat didalam variabel program kerja mendapatkan angka partisipasi yang positif dalam artian sesuai hasil kuesioner yang disebarkan dominan menjawab setuju, ini menunjukkan program kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga hipotesis dapat di terima.

Hasil dari penelitian ini memiliki kesamaan berdasarkan yang telah diteliti oleh Ana Maria (2020) bahwa variabel implementasi program pemberdayaan masyarakat (variabel independen) terhadap variabel tingkat kesejahteraan masyarakat (variabel dependen) menunjukkan nilai t-hitung $6,310 > 2,021$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, implementasi program pemberdayaan masyarakat (variabel independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat.

Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merupakan upaya merubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian lewat empat aspek yaitu, perlindungan sosial, peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi lokal. Dalam kegiatan pemberdayaan, elemen utama dalam pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri, bukan fasilitator. Tugas fasilitator hanya lah sebagai pendorong, agar semua bakat dan potensi yang ada pada diri masyarakat muncul. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan bisa dikatakan berhasil jika, masyarakat berinisiatif melakukan kegiatan, baik kegiatan social atau kegiatan usaha, untuk memperbaiki situasi dan kondisinya sendiri.

c. Penggunaan Anggaran Desa dan Program Kerja desa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dari hasil perhitungan uji hipotesis secara diperoleh tingkat signifikansi variabel Penggunaan Anggaran Desa dan Program Kerja yaitu 0,000 yang berarti nilai tersebut ternyata lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Kemudian, penelitian ini juga dapat diketahui bahwa hasil variabel program kerja desa memiliki nilai F hitung sebesar 22,889 dan F tabel 3,09 Sehingga perhitungan variabel Penggunaan Anggaran Desa dan Program Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan Penggunaan Anggaran Desa program kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dikarenakan nilai signifikansi Penggunaan Anggaran Desa dan program kerja berada dibawah nilai signifikan yang telah di tetapkan dan koefisien regresi memiliki arah hubungan yang positif, kemudian nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan indikator yang terdapat didalam variabel independen mendapatkan angka partisipasi yang positif dalam artian sesuai hasil kusioner yang di sebarakan dominan menjawab setuju, dalam artian walaupun variabel penggunaan anggaran desa tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara parsial tetapi ketika digabungkan dengan variabel program kerja maka dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara simultan atau penggunaan anggaran desa harus tepat penyalurannya terhadap program kerja yang di laksanakan sehingga hipotesis dapat di terima.

Proses pemberdayaan bukanlah pada proses pemberian hibah. Karena metode pemberian hibah, tak akan banyak melahirkan perubahan masyarakat. Kegiatan Pemberdayaan Sosial, membutuhkan stimulasi. Stimulasi bisa berupa pelatihan maupun modal. Dengan pelatihan, masyarakat memperoleh pengetahuan hendak kemana mereka melangkah, dan bagaimana prosesnya. Jika kondisi masyarakat dalam memberdayakan diri disegala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka hal ini dapat berpengaruh pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat, memuat bahwa kesejahteraan masyarakat ialah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga mampu melakukan fungsi sosialnya.

BAB V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan anggaran desa dan program kerja desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa mulyorejo kecamatan sukamaju selatan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS versi 24 dan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan .

- a. Penggunaan Anggaran Desa tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.
- b. Program Kerja Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.
- c. Penggunaan Anggaran Desa dan Program kerja Desa berpengaruh positif dan signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

4.2. Saran

- a. Hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kita untuk menyalurkan dana desa dan menjalankan program kerja dengan tepat sasaran sesuai kondisi sosial dan geografis desa.
- b. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 32,1 %.
- c. Peneliti selanjutnya agar lebih cermat dalam memilih responden agar pengumpulan data bisa lebih valid dan akurat.

4.3. Keterbatasan

- a. Penelitian ini menggunakan kusioner sehingga kemungkinan dapat di temui responden yang menjawab asak-asalan tidak serius dan tidak memahami isi dari pernyataan pada kusioner
- b. Terdapat beberapa sampel yang tidak ingin berpartisipasi dalam mengisi foam kusioner sehingga menyulitkan penliti mencari responden yang ingin dan tepat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditiya, Adam. 2020. "Implementasi Perencanaan Pembangunan Di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." *Sustainability (Switzerland)* 4(1): 1–9. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article>.
- Ana Maria. 2020. "Pengaruh Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kenyayan Kecamatan Siluq Ngurai Kutai Bali Kalimantan Timur." *Syria Studies* 7(1): 37–72. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625.
- Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Ponegoro.
- Harahap, Ainul Yusna. 2021. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa Di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang)." *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting* 1(3): 151–57.
- Hariyani, Desi. 2018. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur)." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Hasibuan. 2009. *Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khasanah, Afista Nur, and Ichwan Marisan. 2022. "Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara) Abstrak." *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 6(1): 32–47.
- Manulang, M. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- NADIA, EGAH. 2021. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat." : 1–10.
- Nordiawan. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novianto, Dwi. 2019. *Peraturan Pemerintahan Tentang Dana Desa*. Kalimantan Barat: Dewati Press.
- Oktara, Larasati Prima. 2019. *Buku Pintar Mengelola Dana Desa*. Jawa Tengah: Pustaka Indonesia.
- Partini h. 2016. "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan FisiPartini h. (2016). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar." (July): 1–23.

- Peraturan Pemerintah RI. 2014a. “Peraturan Mendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”
- . 2014b. “Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.”
- . 2014c. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 294 Ayat 3 Tentang Alokasi Dana Desa.”
- . 2014d. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”
- . 2015. “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 4 Tentang Prioritas Dana Desa.”
- . 2021. “Permendes PDPT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.”
- Priono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing.
- Rahmah, HNisa Agniya, Laras Pratiwi, and Gista Rismayanti. 2021. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih Di Era Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 3(2): 1–13.
- Riswan. 2018. “Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa BatujalaKecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.” *World Development* 1(1): 1–15.
<http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007>
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023>
<http://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10.1080/23288604.2016.1224023>
- Suardi. 2021. *3 Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Di Desa Parangloe Kecamatan Eremerase Kabupaten Bantaeng Tahun 2019*.
- Sumarni, Mutia. 2020. “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*: 77–90.
- Utami, Lensa Gusti. 2018. “Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.” 2014: 1–83.
- Yulawati, Novemia Nanda. 2019. “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan.” *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (Dd)*: 1–21.